

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara)

Noviana Sri Hastuti

Universitas Pembangunan Panca Budi

ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id

Dito Aditia Darma Nasution

Universitas Pembangunan Panca Budi

ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30596/21423>

ABSTRACT

Regional government financial performance is an important aspect in public financial management. The ability of local governments to manage financial resources efficiently and effectively will influence the success of development and public services in the area. Therefore, it is necessary to evaluate the factors that influence local government financial performance. This research aims to analyze the influence of Regional Original Income (PAD) and Capital Expenditures on the Financial Performance of the Regional Government of North Sumatra Province, where financial performance is measured by the efficiency ratio. This research uses secondary data from the North Sumatra Province Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report (APBD) for the 2019-2022 period. Data analysis was carried out using the multiple linear regression method. The research results show that PAD partially has a positive and significant effect on local government financial performance, while capital expenditure has a negative and significant effect on local government financial performance. The coefficient of determination (R^2) value in this research is 0.437, which means that the Regional Original Income and Capital Expenditure variables are able to explain 43.7% of the variation in Regional Government Financial Performance, while the remaining 56.3% is explained by other variables outside the research model..

Keyword : Capital Expenditure, Efficiency Ratio, Financial Performance, Original Regional Income, Regional Government.

Cara Sitasi : Hastuti, N, S., Nasution, A.D.D.(2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara), *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 24 (2). Hal 157-170. <https://doi.org/10.30596/21423>

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sebagai entitas yang memiliki otonomi fiskal memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerahnya dengan baik guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2020) berisi tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksanaan, dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan

keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat serta mampu meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya (Rondonuwu et al., 2014). Pengelolaan keuangan tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta mampu membiayai belanja daerah dalam pembangunan maupun pelayanan sosial bagi masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah ruang lingkup keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim & Kusufi, 2016). Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sangat ditentukan oleh kinerja keuangannya. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Pemerintah Pusat, 2005). Menurut (Mardiasmo, 2002) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu memperbaiki kinerja pemerintah daerah, membantu dalam mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi dan kelembagaan. Menurut (Halim, 2008), alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menerapkan rasio keuangan terhadap APBD yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas. Kinerja keuangan merupakan ukuran pencapaian dalam aspek keuangan termasuk pendapatan dan belanja daerah, maka kinerja keuangan dapat tercermin dari kenaikan pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah (Lathifa & Haryanto, 2019). Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan rasio efisiensi. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat yang menghasilkan output yang maksimal. Tingkat keefisienan keuangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh perbandingan belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak (Fathah, 2017). Berikut ini merupakan kriteria efisiensi kinerja keuangan.

Tabel 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Rasio Efisiensi Periode 2019-2022

No.	Tahun	Realisasi Total Belanja	Realisasi Total Pendapatan	Rasio (%)
1	2019	13.440.323.706	13.079.598.635	103%
2	2020	15.543.907.765	15.327.752.518	101%
3	2021	13.435.893.167	14.533.386.681	92%
4	2022	12.761.625.564	12.761.625.564	100%

Sumber : sumut.bps.go.id

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara menyandang tidak efisien sebab sebagian besar nilai rasio efisiensi >100% pada tahun 2019, 2020, dan 2022. Hanya pada tahun 2021 kinerja keuangan kurang dari 100% (92%) atau memiliki kriteria efisien. Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut diindikasikan bahwa ketidakmampuan untuk mengelola keuangan dengan efisien dapat mengakibatkan pemangkasan anggaran untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Ini bisa berdampak buruk pada kualitas hidup masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal menjadi dua komponen keuangan yang krusial dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas keuangan pemerintah daerah. Pendapatan itu sendiri terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya. Sedangkan belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer/bagi hasil kabupaten/kota (Nugroho, 2012). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal.

Perubahan dinamis dalam perekonomian, kebijakan fiskal, dan tuntutan masyarakat mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintahan daerah diharapkan bisa menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD salah satu sumber utama pembiayaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah memberikan arti penting bagi daerah karena nantinya akan dapat dipergunakan untuk menjalankan roda pemerintahan guna menunjang kesejahteraan masyarakatnya (Sari & Mustanda, 2019). Semakin besar kontribusi PAD terhadap struktur APBD, maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah dalam meminta bantuan pada pemerintah pusat (Suryana, 2018). Di bawah ini merupakan tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 – 2022**

No.	Tahun	Realisasi PAD	Kenaikan/Penurunan PAD
1	2019	5.761.270.412	-
2	2020	7.583.849.755	32%
3	2021	6.402.714.087	-16%
4	2022	6.819.012.313	7%

Sumber : sumut.bps.go.id

Berdasarkan tabel 1.2. PAD Sumatera Utara mengalami fluktuasi setiap tahun. Penurunan yang cukup besar terjadi pada tahun 2021 sebesar 16%, meskipun tahun 2022 mengalami kenaikan 7%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara mengalami ketidakseimbangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019-2022. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab utama penurunan PAD. Pembatasan aktivitas ekonomi, penurunan kunjungan pariwisata, dan penurunan kegiatan bisnis berdampak negatif pada sektor-sektor ekonomi yang biasanya memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. (Sumawan & Sukarta, 2016) berpendapat bahwa meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah setiap periode

akan menunjukkan tingginya sumber keuangan daerah. Jika sumber keuangan tersebut yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal, maka itu akan mencerminkan kinerja pemerintah daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan (Darwanis & Saputra, 2014) mereka berpendapat bahwa pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah dan pajak daerah sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan mereka. (Amanda & Praptoyo, 2023; Atmoko & Khairudin, 2022; Padang & Padang, 2023) juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani & Wibowo, 2017) menemukan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang memberikan indikasi bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dapat mengurangi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain PAD, belanja daerah juga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena sangat berkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik yang akan diberikan daerah kepada masyarakatnya. Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah (Antari & Sedana, 2018). (Ayinde et al., 2015) dalam (Lathifa & Haryanto, 2019) mengatakan belanja modal pemerintah yaitu pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pada proyek-proyek tertentu guna meningkatkan dan memajukan kemudahan hidup dan kenyamanan warga negaranya untuk jangka waktu yang panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Belanja daerah terdiri dari beberapa bagian salah satunya yaitu belanja modal, belanja modal adalah belanja pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujud yang digunakan untuk kegiatan di dalam pemerintahan. Hal ini ditunjukkan belanja modal dalam bentuk aset tetap yakni peralatan, pembangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Kecil penyerapan anggaran untuk belanja modal dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja dan kualitas pemerintah daerah (Suryana, 2018). Berikut merupakan tabel belanja modal daerah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3. Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2022

No.	Tahun	Realisasi Belanja Modal	Kenaikan/Penurunan Belanja Modal
1	2019	1.249.500.484	-
2	2020	1.796.373.283	44%
3	2021	1.141.203.700	-36%
4	2022	1.891.236.869	66%

Sumber : sumut.bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas, belanja modal mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 36% namun pada tahun 2020 dan 2022 mengalami kenaikan sebesar 44% dan 66%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal mengalami fluktuasi yaitu mengalami perubahan naik turun. Meskipun belanja modal terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup besar. Komposisi belanja daerah ini juga harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah. Apabila kepercayaan publik ini meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang merupakan salah satu sumber

pendapatan asli daerah. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah harus mengalami perubahan, bila sebelumnya lebih banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan alokasi belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Irmayunita Tahir, Masdar Mas'ud, dan Annas Plyriadi (2019) menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan dari belanja modal terhadap kinerja keuangan. Hasil yang sama juga didapat oleh Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019) dan Tri Yuni Pratiwi (2018). Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwasih (2017) menunjukkan pengaruh positif yang tidak signifikan. Melihat fenomena yang terjadi di atas peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara)".

Literature Review Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau Daerah lain yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Ekasuryana, 2018; Indriyani et al., 2019). Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pemerintah Pusat, 2014).

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan gambaran mengenai kondisi keuangan organisasi pada suatu periode tertentu yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah. Menurut (Antari & Sedana, 2018) kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Menurut (Fathah, 2017) kinerja Keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah (Pratiwi, 2018). Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan terdapat beberapa ukuran kinerja yang dapat diperhitungkan diantaranya rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah rasio efisien. Rasio efisien adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisien biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semakin tinggi rasio efisien maka semakin turun kinerja dan sebaliknya semakin rendah efisiensi maka menunjukkan kinerja yang baik. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD (Belanja Daerah)}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Daerah)}}$$

Tabel 4. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Keterangan	Rasio Efisiensi (%)
Tidak Efisien	$X > 100\%$
Efisien Berimbang	$X = 100\%$
Efisiensi	$X < 100\%$

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak (Fathah, 2017).

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Pusat, 2004). Menurut (Halim, 2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan (Mardiasmo, 2002). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang sumbernya dari daerah tersebut. Pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupannya yaitu terdiri dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Pratiwi, 2018). Data belanja modal telah ditransformasikan ke dalam bentuk Logaritma Natural (Ln). Perhitungan rumusnya yaitu:

Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan

Belanja Modal

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Kementerian Keuangan, 2010). Seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas public service (Pratiwi, 2018). Sedangkan menurut (Halim, 2004), Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Total belanja modal didapatkan dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal

aset tetap lainnya. Data belanja modal telah ditransformasikan ke dalam bentuk Logaritma Natural (Ln). Perhitungan rumusnya yaitu:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Lainnya}$$

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Pembahasan mengacu pada data-data yang diperoleh, yang kemudian dipaparkan secara sistematis dan faktual. Analisis ini didasari oleh hipotesis, penelitian, dan bukti – bukti terdahulu, untuk memutuskan model pengukuran. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara dari laporan realisasi anggaran tahun 2019 sampai tahun 2022. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2019) Sampling Jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan alat bantu olah data SPSS versi 25. Persamaan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon_i$$

Keterangan:

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah A : Konstanta Regresi

β_1 dan β_2 : Koefisien Regresi Variabel

Independen X_1 : Pendapatan Asli Daerah

X_2 : Belanja Modal

ϵ_i : Koefisien Error Atau Tingkat Kesalahan Pengganggu

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019).

Tabel 5. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	132	5761270412	7583849755	6641711642	322830084032.99
Belanja Modal	132	1141203700	1891236869	1519578584	293908915557.46
Kinerja Keuangan	132	0,18	0,24	0,23	0.108399
Valid N (listwise)					

Sumber: Olah Data SPSS, 25

Berdasarkan tabel 5. Dapat dideskripsikan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel X_1 memiliki nilai terendah 5761270412 dan nilai tertinggi 7583849755, nilai rata-rata (mean) 6641711642, dan standar deviasi 322830084032,99. Pada variabel X_2 Belanja Modal memiliki nilai terendah 1141203700 dan nilai tertinggi 1891236869,

nilai rata-rata (mean) 1519578584, dan standar deviasi 293908915557,46. Dan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel Y memiliki nilai terendah (min) 0,18 dan nilai tertinggi (max) 0,24 dengan nilai rata-rata (mean) 0,23. Standar deviasi sebesar 0,108399 (dalam persen) di bawah rata-rata menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diteliti memiliki perbedaan yang relatif kecil pada setiap tahunnya.

Uji Asumsi Klasik

Menurut (Ghozali, 2018) untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi dalam penelitian ini memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak. Cara untuk mendeteksi hal tersebut yaitu dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Distribusi dapat dikatakan normal apabila nilai $sig > 0,05$ (Ghozali, 2018).

Tabel 6. Uji Normalitas - Kolmogorov-Smirnov (K-S)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N		132
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	0
		.7768574
Most Extreme Differences	Absolute	.171
	Positive	.126
	Negative	-.171
Test Statistic		.987
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Olah Data SPSS, 25

Berdasarkan tabel 6. Dapat dilihat bahwa nilai output Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200 lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi penelitian terdapat korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antar variabel, artinya tidak ada gejala multikolinearitas dengan melihat besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan juga nilai tolerance. Nilai yang dipakai untuk melihat tidak adanya gejala multikolinearitas adalah nilai $VIF < 10$ dan nilai tolerance $< 0,10$ (Ghozali, 2018).

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.			
Model		B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-4,366	3,873		.000	0,268		
	PAD	0,242	0,118	0,272	.000	0,049	.566	
	Belanja Modal	0,198	0,053	0,496	.078	0,001	.271	

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Olah Data SPSS,25

Berdasarkan tabel 7. Dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinearitas memiliki nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser, dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai sig >0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, namun sebaliknya jika nilai sig.<0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.269	.140		.1914	.349
	PAD	.028	.015	.279	1.887	.218
	Belanja Modal	.024	.021	.175	.1160	.172

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Olah Data SPSS,25

Berdasarkan tabel 9. Dapat dilihat hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glejser bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikansi >0,05 maka dapat disimpulkan model penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda karena jumlah variabel independen terdiri lebih dari satu. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk melihat prediksi seberapa tinggi nilai variabel X1 (Pendapatan Asli Daerah) dan X2 (Belanja Modal) memengaruhi variabel Y (Kinerja Keuangan). Hasil perhitungan regresi dapat dilihat pada tabel 10. berikut ini.

Tabel 10. Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.102	.017		6.119	0,268
PAD	.242	.118	.272	3.557	0,049
Belanja Modal	-.198	.053	-.232	-.2183	0,001

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Olah Data SPSS,25

Berdasarkan tabel 10. Maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon_i$

$$Y = 0.102 + 0.242X_1 - 0.198X_2 + e$$

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa, Nilai konstanta menunjukkan nilai positif yaitu 0.102 yang berarti apabila pendapatan asli daerah dan belanja modal bernilai konstan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan 0.102. Nilai koefisien regresi pendapatan daerah sebesar 0.242 menunjukkan bahwa apabila pendapatan asli daerah mengalami peningkatan 1% maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan sebesar 0.242, artinya adanya peningkatan PAD maka semakin meningkat pula kinerja keuangan pemerintah. Nilai koefisien regresi belanja modal sebesar -0.198 menunjukkan bahwa apabila belanja modal mengalami peningkatan 1% maka kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami penurunan sebesar 0.198.

Uji Hipotesis

Setelah melakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik dalam model regresi, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji hipotesis dengan melakukan uji koefisien determinasi (adjusted R²) dan uji statistik t (uji t):

Uji Parsial (t)

(Ghozali, 2016) menyatakan bahwa uji t atau t-test digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai signifikan (Sig.) dengan nilai probabilitas 0.05.

Tabel 11. Hasil Uji Parsial (t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.102	.017		6.119	.268

1	PAD	.242	.118	.272	3.557	.049
	Belanja Modal	-.198	.053	-.232	-.2183	.001

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Olah Data SPSS,25

Berdasarkan tabel 11. Dapat dilihat hasil uji t (parsial) yaitu sebagai berikut: Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikansi sebesar .049 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Belanja Modal memiliki nilai signifikansi 0.001 lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima, yaitu Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Uji Simultan (F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 11. Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig .
1	Regression	60.235	3	30.117	10.853	.000 ^b
	Residual	77.701	128	2.775		
	Total	137.935	131			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, PAD

Sumber: Olah Data SPSS,25

Berdasarkan tabel 11. Diperoleh bahwa nilai Fhitung sebesar 10.853 dan nilai-p-value 0.000 lebih kecil dari 0.05. hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel dependen menjelaskan variabel independen. Berikut hasil perhitungan uji koefisien determinasi.

Tabel 12. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.661 ^a	.437	.396	.166584

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, PAD

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Olah Data SPSS,25

Berdasarkan tabel 12. Hasil koefisien determinasi memiliki nilai r-square sebesar 0.437 atau 43.7%. hasil ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dan Belanja Modal berpengaruh sebesar 43.7% terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan sisanya sebesar 56.3% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Discussion

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari tabel 11. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai *t*-hitung 3.557 dengan nilai signifikansi 0.049 lebih kecil dari 0.05 ($0.049 < 0.05$) dan nilai koefisien sebesar 0.242. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan yang dimilikinya. Semakin besar PAD yang diperoleh suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti, semakin besar PAD yang diperoleh suatu daerah, maka semakin kecil rasio efisiensi yang dihasilkan, yang mengindikasikan kinerja keuangan yang semakin baik. Temuan ini menekankan pentingnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangannya, yang pada gilirannya dapat menunjang pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Darwanis & Saputra, 2014) dan (Amanda & Praptoyo, 2023; Atmoko & Khairudin, 2022; Padang & Padang, 2023) yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari tabel 11. Variabel Belanja Modal memiliki nilai *t*-hitung -2.183 dengan nilai signifikansi 0.001 lebih kecil dari 0.05 ($0.001 < 0.05$) dan nilai koefisien sebesar -0.198. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan investasi seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan aset tetap, dan pengeluaran lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan Belanja Modal justru menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diukur dengan Rasio Efisiensi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: a). Belanja modal yang dikeluarkan belum mampu menghasilkan peningkatan pendapatan secara signifikan dalam jangka waktu yang sama. b). Adanya ketidakefisienan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan belanja modal, seperti biaya yang lebih tinggi dari perkiraan atau adanya kebocoran anggaran. c). Belanja modal yang digunakan untuk membangun infrastruktur atau aset tetap tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Hal ini dapat terjadi jika peningkatan Belanja Modal tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang memadai, sehingga rasio efisiensi menjadi lebih rendah (kurang efisien). Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa alokasi Belanja Modal dilakukan secara tepat dan dapat menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan di masa depan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irmayunita Tahir, Masdar Mas'ud, dan Annas Plyriadi (2019) yang menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan dari belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan diantaranya: Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara). Belanja Modal secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara).

REFERENCE

- Amanda, C. D., & Praptoyo, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(5), 1–17.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080–1110. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i02.p19>
- Atmoko, C. A., & Khairudin, K. (2022). Dampak Pendapatan Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 291–296. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1295>
- Ayinde, K., Kuranga, J., & Lukman, A. F. (2015). Modeling Nigerian Government Expenditure, Revenue and Economic Growth: Co-Integration, Error Correction Mechanism and Combined Estimators Analysis Approach. *Asian Economic and Financial Review*, 5(6), 858–867. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr/2015.5.6/102.6.858.867>
- Darwanis, D., & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183–199. <https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3628>
- Ekasuryana, I. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. *Universitas Pakuan Bogor*. Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *EBBANK*, 8(1), 33–48.
- Ghazali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS Edisi Sembilan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2016). *Teori, Konsep dan Aplikasi-Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Indriyani, P., Haryanto, A., & Herlisnawati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kota Depok Periode 2011-2017. *Universitas Pakuan Bogor*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Kementerian Dalam Negeri*(13). kemendagri.go.id : 73 hlm.

- Kementerian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. In Kementerian Dalam Negeri (77). BN.2020/No.1781, kemendagri.go.id : 5 hlm.
- Kementrian Keuangan. (2010). PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. In Kementerian Keuangan (71). <https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>.
- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2), 2–10.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. *Kompartemen*, 15(1), 57–66.
- Nugroho, F. (2012). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah). Universitas Diponegoro.
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *JRAK*, 9(2), 303–318.
- Pemerintah Pusat. (2004). Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. In Pemerintah Pusat (33). LN. 2004/ No. 126, TLN NO.4438, LL SETNEG : 44 HLM.
- Pemerintah Pusat. (2005). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. In Pemerintah Pusat (58). LN. 2005 No. 140, TLN No. 4578 LL SETNEG : 69 HLM. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>
- Pemerintah Pusat. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. In Pemerintah Pusat (23). LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM.
- Pratiwi, T. Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Universitas Negeri Yogyakarta